

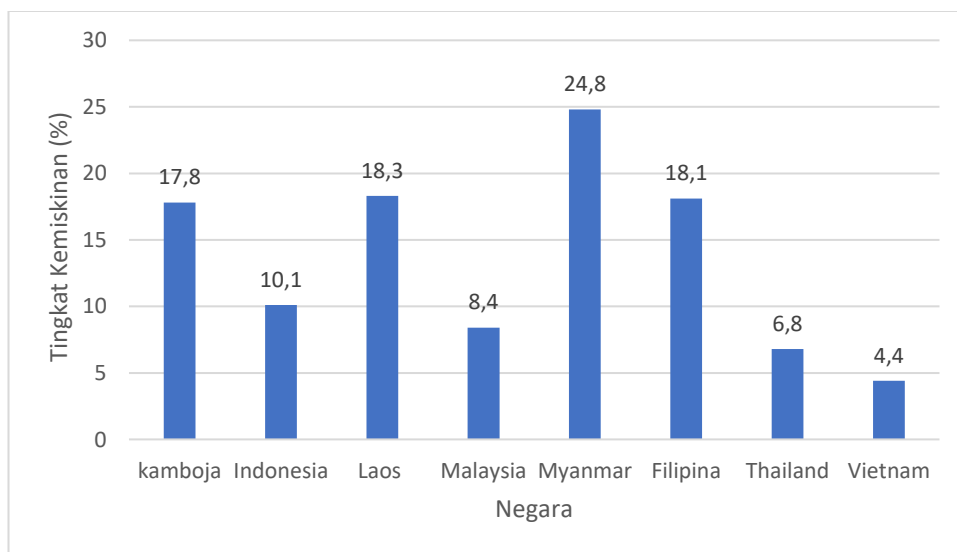
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dan ekonomi yang dinilai sangat kompleks dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar dapat terselesaikan dengan baik. Lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standard hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Seluruh negara di muka bumi ini tidak bisa luput dari kemiskinan, hal ini seakan-akan dijadikan akar masalah yang sulit diatasi. Bahkan negara maju yang dijuluki sebagai negara adidaya yaitu Amerika Serikat pun masih mempunyai masalah kemiskinan, meskipun jumlahnya tidak sebesar negara-negara lainnya khususnya di negara sedang berkembang.

Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara enam karakteristik yaitu tingkat pendapatan nasional yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lamban, pendapatan perkapita yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, mayoritas penduduk berada di bawah tekanan kemiskinan absolut, fasilitas kesehatan yang buruk dan terbatas, serta yang terakhir yaitu fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan angka buta huruf masih tinggi.

Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Berikut merupakan grafik terkait tingkat kemiskinan di delapan negara ASEAN yang dihitung berdasarkan presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di negaranya masing-masing.



Sumber: *ASEAN Statistical Highlights, 2023* (diolah)

Gambar 1.1

Tingkat Kemiskinan di Negara Anggota ASEAN Tahun 2022.

Gambar 1.1 menunjukkan data mengenai kemiskinan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2022 (data tidak termasuk negara Singapura dan Brunei Darussalam). Indonesia menempati posisi ke-lima negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di ASEAN dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,1% berada dibawah negara Myanmar, Laos dan Filipina dan Kamboja. Tingkat kemiskinan Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Malaysia, Thailand dan

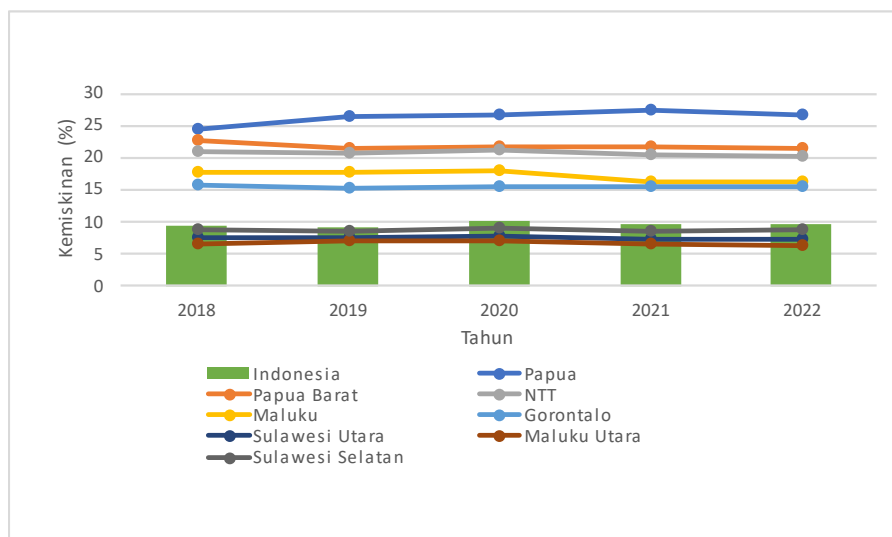
Vietnam yang notabene memiliki kultur ekonomi, sosial maupun pertanian yang mirip dengan Indonesia.

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan di bidang sosial dan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintah. Problematika kemiskinan merupakan suatu hal yang harus ditanggulangi oleh berbagai pihak di Indonesia baik dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan tingkatan yang paling bawah. Masalah kemiskinan memanglah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi fokus pembangunan negara dalam hal memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya kemiskinan wajar terjadi khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia namun, kemiskinan akan menjadi suatu permasalahan kesejahteraan yang sulit untuk ditanggulangi apabila tingkat kemiskinan sudah tidak terkendali atau dalam artian sebagian besar masyarakat hidup tidak layak

Saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan ekonomi dan mengupayakan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Indonesia secara statistik memang menunjukkan tren negatif yakni jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun. Namun, di sisi lain penurunan persentase tingkat kemiskinan tersebut dirasa masih belum signifikan dan secara kuantitas kemiskinan di Indonesia masih tergolong banyak. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk

Indonesia saat ini adalah 275,77 juta jiwa sedangkan penduduk miskin di Indonesia pada periode september 2022 berjumlah sekitar 14,16 juta jiwa.

Pada beberapa provinsi di Indonesia tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi bahkan di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ketimpangan terlihat dengan masih terdapatnya tempat pemukiman kumuh yang berada di pinggir sungai, rumah tanpa akses listrik, dan keterbatasan layanan informasi. Selain itu masih banyak masyarakat yang masih sulit dalam mencari pekerjaan ataupun mendapatkan penghasilan sehingga dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengukuran kemiskinan yang dipergunakan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia menggunakan persentase kemiskinan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai Tahun (diolah)

Gambar 1.2

Grafik Tingkat Kemiskinan pada 5 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia pada Tahun 2018-2022.

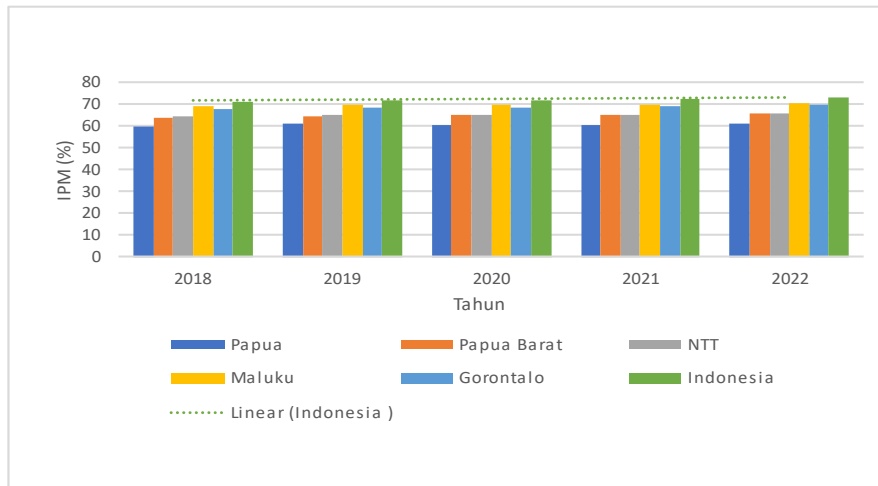
Dapat dilihat dalam gambar 1.2 yang berisikan data statistik yang bersumber dari publikasi BPS mengenai persentase penduduk miskin yang berada di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yakni Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan grafik garis tingkat kemiskinan pada lima provinsi tersebut berada di atas rata-rata kemiskinan Indonesia dan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara yang notabene sama-sama berada di wilayah Indonesia bagian timur. Dalam grafik tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada provinsi yang menjadi objek penelitian ini. Dalam grafik tersebut terlihat bahwasanya jumlah penduduk miskin meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 atau pada saat pandemi *Covid-19* terjadi yang memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah produksinya serta mengurangi jumlah karyawan yang dipekerjakan atau istilahnya adalah melakukan PHK. Kendati adanya kenaikan tingkat kemiskinan, data juga menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan namun dinilai belum signifikan antara tahun 2018 sampai 2022. Selain tingkat kemiskinan pada lima provinsi tersebut tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang berkisar pada 9,57% pada tahun 2022, namun juga angka kemiskinannya melebihi target tingkat kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang hanya menargetkan kemiskinan sebesar 8,5% - 9% (Bappenas, 2023). Oleh karena

itu, kemiskinan di Indonesia masih perlu diperhatikan dan diteliti terkhusus pada lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo diprediksi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran (Todaro, 2003). Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah.

Terdapat tiga komponen yang menjadi indikator dalam perhitungan IPM yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan kehidupan yang layak. Pada delapan tahun terakhir keadaan indeks pembangunan manusia di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat IPM Indonesia mencapai 69,55 persen dan pada selang delapan tahun kemudian meningkat menjadi 72,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan IPM di Indonesia cukup baik dan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Namun dalam penelitian ini IPM yang digunakan bukanlah

IPM Nasional melainkan IPM setiap provinsi khususnya provinsi yang menjadi objek penelitian dan di bawah ini merupakan grafiknya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai Tahun (diolah)

Gambar 1.3

Grafik IPM Pada Lima Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2018-2022.

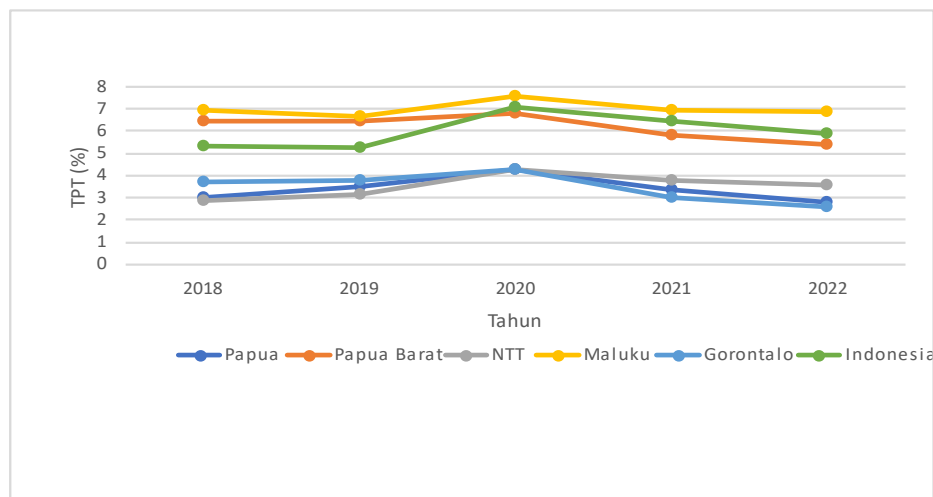
Gambar 1.3 menunjukkan indeks pembangunan manusia pada lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2022. Dari grafik tersebut terlihat IPM dari lima provinsi tersebut tergolong kedalam kategori menengah atas yaitu antara 66,0 sampai 79,9. Namun IPM kelima provinsi tersebut masih di bawah nilai IPM Indonesia (Nasional).

Besaran angka IPM tiap provinsi sangat bervariasi. Hal tersebut tercermin dari makin besarnya *range* antara angka IPM tertinggi dan terendah. Bisa jadi ini disebabkan prioritas sasaran program maupun kebijakan yang diambil masing-masing provinsi tidak sama. Provinsi Maluku menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 70,22% pada tahun

2022. Sedangkan peringkat terbawah IPM ditempati Provinsi Papua sebesar 61,39% (BPS, 2023). Walaupun indeks pembangunan manusia pada lima provinsi tersebut menunjukkan pergerakan yang meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat kemiskinannya juga masih relatif tinggi. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja. Produktivitas yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemiskinan dan menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang tidak ada hentinya. Oleh karena itu, IPM diindikasikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh beberapa studi empiris (Ali, Timun, & Murfain, 2022; Azriyansyah, 2022; Bondoyudho, Laut, Septiani, Ekonomi, & Tidar, 2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Estrada & Wenagama, 2020; Praja, Muchtar, & Sihombing, 2023; Saputra & Harahap, 2022). Dengan demikian, indeks pembangunan manusia memiliki peran penting untuk menilai sejauh mana perkembangan sumber daya manusia dalam menciptakan produktivitas yang baik dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Faktor selanjutnya yang memiliki kaitan dengan kemiskinan adalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6,18% dan pada tahun 2022 turun menjadi 5,86%. Walaupun tingkat pengangguran terbuka secara nasional mengalami penurunan, akan tetapi tidak semua provinsi mengalami penurunan TPT khususnya untuk provinsi yang menjadi objek penelitian ini. Terdapat kenaikan, penurunan bahkan stagnansi TPT di provinsi yang menjadi objek

penelitian. Berikut merupakan grafik menunjukkan pergerakan TPT di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai Tahun (diolah)

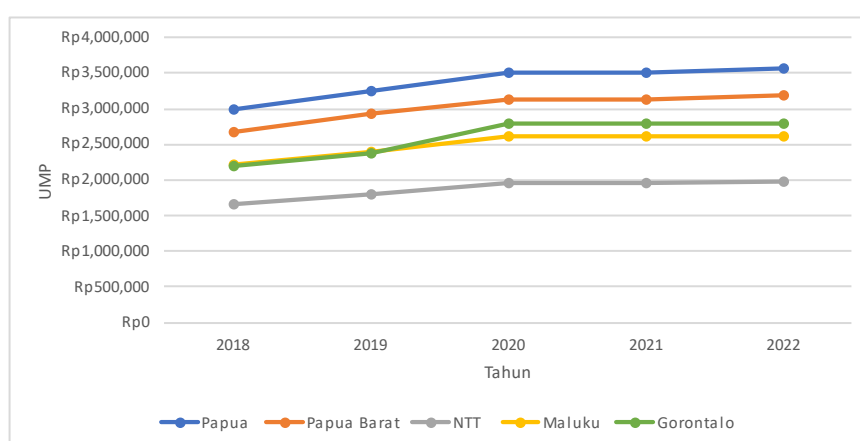
Gambar 1.4

Grafik TPT Pada Lima Provinsi dengan tingkat kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2018-2022.

Berdasarkan gambar 1.4 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tersebut memiliki TPT yang dinilai cukup rendah dan turun setiap tahunnya. Bahkan nilai TPT rata-rata kelima provinsi tersebut berada di bawah TPT Indonesia kecuali Provinsi Maluku yang memiliki nilai TPT sebesar 6,88% pada tahun 2022. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat akibat kurangnya atau bahkan tidak adanya produktivitas yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan lain yaitu kemiskinan. Hal tersebut juga didukung dengan studi terdahulu yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Ali et al., 2022; Azriyansyah, 2022; Bintang & Woyanti, 2018; Bondoyudho et al.,

2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Estrada & Wenagama, 2020; Laga Priseptian, 2022; Mahsunah, 2013; Praja et al., 2023; Saputra & Harahap, 2022; Sari, 2021).

Selain tingkat pengangguran terbuka (TPT), faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah perubahan tingkat upah minimum provinsi (UMP). Biasanya besaran UMP tiap tahunnya akan mengalami peningkatan dan besaran UMP setiap provinsi berbeda-beda misalnya tahun 2022 Provinsi Papua memiliki UMP yang terbilang paling tinggi di antara lima provinsi tersebut yaitu sebesar Rp.3.561.932 dan provinsi yang memiliki UMP terendah yaitu Provinsi NTT yaitu sebesar Rp.1.975.000. Berikut merupakan grafik yang berisikan nominal UMP lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berbagai Tahun (diolah)

Gambar 1.5

Grafik Nominal UMP pada 5 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia pada Tahun 2018-2022.

Dari grafik Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bisa saja berdampak positif maupun negatif kepada kemiskinan. Kenaikan UMP bisa berdampak negatif bagi kemiskinan apabila kenaikan UMP direspon oleh penawaran tenaga kerja oleh masyarakat. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu (Ali et al., 2022; Bondoyudho et al., 2020; Dwi Prasetyo & Arifin, 2022; Laga Priseptian, 2022; Sari, 2021). Namun kenaikan UMP dapat berpengaruh positif kepada kemiskinan. Hal tersebut mungkin terjadi apabila tingkat penawaran kerja melebihi tingkat permintaan tenaga kerja hal ini dapat berdampak pada pengangguran masyarakat lokal dan menimbulkan masalah kemiskinan. Adapun penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa UMP memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan (Ihsan & Ikhsan, 2018; Saputra & Harahap, 2022).

Walapun sudah terdapat penelitian yang membahas terkait pengaruh IPM, TPT dan UMP terhadap kemiskinan, namun terdapat celah penelitian yang menjadi acuan referensi penelitian ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitian yang dinilai urgen dan perlu diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu belum pernah melakukan penelitian terhadap pengaruh IPM dengan metode perhitungan terbaru, TPT dan UMP terhadap tingkat kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo secara bersamaan dengan menggunakan data panel gabungan dari runtun waktu 2010-2022 dan *cross section* dari masing-masing provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berniat untuk melakukan penelitian terkait tentang pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan yang terjadi di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo selama kurun waktu tiga belas tahun (2010-2022). Dengan menggunakan variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) sedangkan untuk variabel dependennya yaitu Tingkat Kemiskinan. Dari topik tersebut, penulis akan membuat suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh IPM, TPT, dan UMP Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 5 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara parsial indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap variabel kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh simultan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap variabel kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh parsial yang diberikan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap variabel kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan yang diberikan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap variabel kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tahun 2010-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi para penentu kebijakan dan pemerintah pusat maupun daerah dari penelitian ini adalah sebagai referensi dalam menentukan kebijakan atau peraturan dalam upaya menangani kemiskinan di masa yang akan datang
2. Kegunaan bagi para pembaca dan penulis adalah sebagai informasi ataupun wawasan mengenai kondisi kemiskinan yang terjadi di lima provinsi termiskin di Indonesia serta hasil analisis faktor penyebabnya
3. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memilih topik dan objek yang berkaitan dengan penelitian ini.

